

NOTA DINAS
NOMOR 95/IJ-IND.4/PW/VI/2026

Yth. : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Plt. Inspektur III
Hal : Penyampaian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan II Tahun 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 30 Juni 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Lembaga Pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan rencana pembangunan Triwulan II (April-Juni) Tahun Anggaran 2026 dengan ini Inspektorat III menyampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada Triwulan II TA 2026 adalah sebesar 166 (seratus enam puluh enam) laporan. Adapun kegiatan yang dilakukan selama triwulan II TA 2026 adalah sebagai berikut:

1. Output kegiatan audit yang direalisasikan sampai dengan Triwulan II adalah sebanyak 7 Laporan dengan rincian sebagai berikut:
 - Audit kinerja TA 2026 Eselon 1 BSKJI
 - Audit Kinerja TA 2026 BBSPJIKMN Bandung
 - Audit Kinerja TA 2026 BBSPJILM Bandung
 - Audit Kinerja TA 2026 BBSPJIBBT Bandung
 - Audit Kinerja TA 2026 BBSPJIT Bandung
 - Audit Kinerja TA 2026 BBSPJIKFK Jakarta
 - Audit Kinerja TA 2026 BSPJI Jakarta
2. Output Kegiatan Reviu yang direalisasikan selama Triwulan II adalah sebanyak 130 laporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - Reviu Revisi Anggaran TA 2026
 - Reviu Revisi RKAKL TA 2026
 - Reviu Laporan Keuangan dan BMN TA 2025
 - Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal TA 2025
 - Reviu LK/BMN TA 2026 Unit BSPJI

- Reviu LK/BMN TA 2026 Unit BBSPJI
 - Reviu LK/BMN TA 2026 Unit BSKJI
 - Reviu LK/BMN TA 2026 Unit ITJEN
 - Reviu LK/BMN TA 2026 Unit PUSDATIN
 - Reviu Pengajuan Revisi DIPA Dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Direktif Prioritas Presiden TA 2025
 - Reviu RKBMN TA 2026
 - Reviu Penajaman Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026.
3. Output kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang direalisasikan sampai dengan triwulan II adalah sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP unit 24 UPT BSKJI, Unit Eselon II BSKJI, Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin.
 4. Output Kegiatan Penganggaran yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah Rancangan Anggaran Biaya Inspektorat III TA 2026.
 5. Output Kegiatan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah Penyusunan Laporan Penyusunan LAKIP TA 2026.

Hasil yang dicapai berdasarkan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja selama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU		Target 2026	Target TW II	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,45%	0,45%	Belum dapat diukur
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III (IKU)	62%	62%	78,75%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Nilai SAKIP Inspektorat III	79,45	79,45	82,60
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III	63	63	Belum dapat diukur
Tatakelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III	91,3%	91,3%	Belum dapat diukur

Realisasi anggaran pada Triwulan II TA 2026 adalah sebesar Rp.392.816.418,00,- atau sebesar 96,48% dari total pagu riil sebesar Rp.407.145.000,00-.

Terdapat perbedaan hari pelaksanaan dan ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan audit kinerja kurang efektif dan tidak dapat menggambarkan kinerja organisasi secara komprehensif.

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan II ini, Inspektorat III mengupayakan langkah tindak lanjut dengan merencanakan kembali ruang lingkup pelaksanaan audit, serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Melakukan control pagu sampai dengan detil akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran perbulannya

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur III,



M. Nilzam

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

APIP
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2026

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP39)

INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL



TRIWULAN II TAHUN 2026

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA. JUNI 2026

Daftar Isi

BAB I	2
PENDAHULUAN	3
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	4
1.3. Struktur Organisasi.....	5
BAB II	7
RENCANA PROGRAM KEGIATAN.....	7
2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026	7
2.2. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ...	9
BAB III	14
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	14
A. Hasil yang Telah Dicapai	14
B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran	21
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	26
D. Langkah Tindak Lanjut	28
PENUTUP.....	30

Daftar Tabel

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 5 Program/Kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2026	7
Tabel 6 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2026	8
Tabel 7 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2026	10
Tabel 8 Sasaran dan Indikator yang akan diwujudkan Tahun 2026	12
Tabel 9 Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Tahun 2026	12
Tabel 10 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal yang telah terlaksana	14
Tabel 11 Kegiatan Audit yang dilaksanakan pada Triwulan II	15
Tabel 12 Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024	18
Tabel 14 Analisis Capaian Kinerja	22
Tabel 15 Realisasi Fisik Program/Kegiatan Inspektorat III Tahun 2026	22
Tabel 16 Realisasi Anggaran yang dicapai sampai Trriwulan II Tahun Anggaran 2026	26
Tabel 17 Output kegiatan yang direalisasikan pada Triwulan II TA 2026	30
Tabel 18 Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II TA 2026	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat III merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang berperan sebagai aparat pengawasan internal dalam mendorong tercapainya tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain itu, Inspektorat III juga berfungsi untuk mencegah sejak dini terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III memiliki tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya. Selain itu, Inspektorat III juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta menyusun laporan hasil pengawasan terhadap BSKJI, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, pesuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat III bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

- a. melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit Eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit Eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit Eselon I;

- c. melaksanakan pendampingan terhadap unit Eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit Eselon I; dan
- d. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan optimalisasi fungsi pengawasan, Inspektorat III telah menyusun rencana kegiatan tahun 2026 yang mengacu pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2026, Inspektorat III melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target sasaran strategis serta mendukung program Inspektorat Jenderal melalui upaya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan Program Pengembangan Industri oleh Inspektorat III.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian sepanjang tahun 2026, yaitu :

- a. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan professional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efesiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangkamenjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sisitem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan professional aparat pengawasan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuatitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2022, Inspektorat III melakukan pengawasan pada

BSKJI, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat III juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya, serta menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat III melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja Eselon I cakupan tugas Inspektorat III.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat III tersebut, Inspektorat III didukung dengan kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III, Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III, Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa, serta Pengelolaan Arsip.

1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat III terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.



Dukungan personil Inspektorat III per 31 Maret 2026, terdiri dari:

a. ESELON, FUNSIONAL ,PELAKSANA

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Bagian/ Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Muda	JFA Pratama	JFA Terampil	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			1	4	6	3	2		16

Pimpinan dan Tata Usaha	1	1						3	5
Jumlah	1	1	1	4	6	3	2	3	21

b. PENDIDIKAN

Tabel 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Bagian/Bidang	D3	D4	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	2		8	6	16
Pimpinan dan Tata Usaha		1	3	1	5
Jumlah	2	1	11	7	21

c. GOLONGAN

Tabel 3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Bagian/Bidang	Honorar	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		2	9	5	16
Pimpinan dan Tata Usaha	1		3	1	5
Jumlah	1	2	12	6	21

d. JENIS KELAMIN

Tabel 4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	8	8	16
Pimpinan dan Tata Usaha	2	3	5
Jumlah	10	11	21

BAB II

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Guna menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat III melaksanakan kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”, dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5 Program/Kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2026

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	KET
1	Audit	10 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
2	Reviu	84 Laporan	- Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2026 dan Semester I TA 2026 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (54 laporan) - Reviu RKAKL TA 2027 BSKJI, Itjen dan Pusdatin (27 laporan) - Reviu RKBMN BSKJI, Itjen, Pusdatin (3 laporan)
3	Monitoring dan Evaluasi	27 Laporan	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (26 laporan) - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PINOTI (1 laporan)
4	Konsultasi dan Pengawasan	1 Laporan	- Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal - Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Berisiko Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien - Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker
5	Layanan Penyelenggara Kearsipan	1 Laporan	Penyusunan Kearsipan Inspektorat III Tahun 2026
6	Layanan Manajemen Kinerja	1 Laporan	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan

			Program/Kinerja Inspektorat III Tahun 2026
5	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III TA 2026 - Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2026
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) dan LAKIP Inspektorat III Tahun 2026

Besaran pagu anggaran efektif guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.407.145.000,-

Tabel 6 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat III Tahun Anggaran 2026

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU
1843	PENGAWASAN EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	126 Laporan	407.145.000
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	126 Laporan	407.145.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1.000.000
955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1.000.000
965	Layanan Audit Internal	10 Laporan	187.542.000
974	Layanan Penyelenggara Kearsipan	1 Laporan	1.000.000
975	Layanan Manajemen Kinerja	1 Laporan	1.000.000
981	Layanan Reviu	84 Laporan	4.124.000
982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	27 Laporan	134.356.000
055	Layanan Konsulting dan Pengawasan	1 Laporan	77.123.000
			407.145.000

2.2. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan program/kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada poin 2.1 yang akan dicapai oleh Inspektorat III pada tahun 2026, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin), adalah meningkatnya kualitas pengawasan, Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akutabel dan Berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta selaras dengan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA, yang dijabarkan lebih lanjut dalam RKA-K/L dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), maka indikator kinerja kegiatan Inspektorat III pada Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut: Sasaran program/kegiatan beserta indikator kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Cakupan Tugas Inspektorat III (IKU)	0,45%	• Audit Kinerja dan Kepatuhan • Reviu RKA/KL • Reviu Revisi Anggaran • Reviu Laporan Keuangan • Reviu RKBMN • Evaluasi SAKIP (UPT BSKJI, Eselon II Pusat, Eselon I) • Evaluasi Program/Kegiatan Prioritas • Asistensi Manajemen Risiko • Pengawasan Kegiatan PN
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III (IKU)	62%	• Pemantauan Tindak Lanjut BSKJI, BBSPJI, BSPJI • Pemantauan Tindak Lanjut PUSDATIN • Pemantauan Tindak Lanjut ITJEN
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat III	79,45	• Monitoring dan Evaluasi kinerja unit secara berkala • Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Perencanaan • Penatausahaan RKA-KL DIPA TA 2026 • Penyusunan Laporan Kinerja TA 2026 dan PP39 TW IV 2026 • Penilaian SAKIP oleh ITJEN
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III	63	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
3.	Tatakelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III	91,3%	• Pelaksanaan proses pengadaan TW I-IV TA 2026 • Pengumuman rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP • Pemantauan pengisian data tkdn dan pdn pada aplikasi e-monitoring

a.) Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Inspektorat Jenderal Tahun 2026

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2026, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2026 adalah:

Tabel 8 Sasaran dan Indikator yang akan diwujudkan Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat III (IKU)	0,45%
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit (Internal) Telah Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat III (IKU)	62%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat III	79,45
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III	63
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III	91,3

b.) Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 per triwulan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Audit
2. Reviu
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Consulting dan Pengawasan
5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Tabel 9 Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
1	Audit	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
2	Reviu	84 Laporan	27 Laporan	0 Laporan	27Laporan	30 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	27 Laporan		27 Laporan		
4	Consulting dan Pengawasan	1 Laporan				1 Laporan
5	Layanan Penyelenggara Kearsipan	1 Laporan				1 Laporan
6	Layanan Manajemen Kinerja	1 Laporan				1 Laporan
6.	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen				1 Dokumen

Output Inspektorat III pada TA 2026 adalah berjumlah 166 (seratus dua puluh) laporan/ dokumen

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil yang Telah Dicapai

- 1.) Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2026 (Januari - Juni) mencapai Rp. 392.816.418 sebesar 96,48% dari pagu Rp407.145.000,-.
- 2.) Adapun realisasi fisik sebanyak 166 Laporan. Data realisasi fisik diperoleh melalui *interview* langsung dengan pengelola/penanggunjawab kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, pada Triwulan II Inspektorat III menetapkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2026 dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (tujuh) indikator kinerja dan target yang akan diwujudkan dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II dapat dilihat sebagai berikut:

SK.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Sampai dengan Triwulan II Indikator batas toleransi temuan material pengawasan Eksternal belum dapat diukur, namun untuk mendukung tercapainya indikator, kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target pada indikator kinerja: Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal yang telah terlaksana adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal yang telah terlaksana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Rencana Kegiatan)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%	• Audit Kinerja Eselon 1 BSKJI • Audit Kinerja BBSPJIKMN Bandung • Audit Kinerja BBSPJILM Bandung • Audit Kinerja BBSPJIBBT Bandung • Audit Kinerja BBSPJIT Bandung • Audit Kinerja BBSPJIKFK Jakarta

			• Audit Kinerja BSPJI Jakarta
			• Reviu LK/BMN BSPJI • Reviu LK/BMN BBSPJI • Reviu LK/BMN BSKJI • Reviu LK/BMN ITJEN • Reviu LK/BMN PUSDATIN • Reviu Pengajuan Revisi DIPA relaksasi anggaran Tahap II Kementerian Perindustrian Satker BSKJI, Inspektorat Jenderal & Pusdatin. • Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI TA 2026 • Reviu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2026 ke-5 • Reviu Penajaman Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026 pada satker BSKJI, Inspektorat Jenderal & Pusdatin • Reviu Revisi Anggaran TA 2026 pada Pusat Data dan Informasi • Reviu Perubahan RKBMN TA 2026 pada BBSPJI Selulosa dan BSPJI Pontianak
			• Pengawasan Kegiatan Pada Cakupan Tugas Inspektorat III Satker Padang

Kegiatan Audit yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Kegiatan Audit yang dilaksanakan pada Triwulan II

No.	Kegiatan Audit	Waktu Pelaksanaan
1.	Audit Kinerja Eselon 1 BSKJI	Januari 2026
2.	Audit Kinerja BBSPJIKMN Bandung	Februari 2026
3.	Audit Kinerja BBSPJILM Bandung	Februari 2026
4.	Audit Kinerja BBSPJIBBT Bandung	Februari 2026
5.	Audit Kinerja BBSPJIT Bandung	Februari 2026
6.	Audit Kinerja BBSPJIKFK Jakarta	Mei 2026
7.	Audit Kinerja BSPJI Jakarta	Mei 2026

Berdasarkan rekap penugasan dan laporan hasil reuiu, pada periode pelaporan Inspektorat III telah melaksanakan berbagai kegiatan reuiu sesuai amanat PP 39, yang mencakup reuiu revisi anggaran TA 2026 pada unit eselon II Itjen, Pusat Data dan Informasi, serta BSKJI dengan total output puluhan laporan CHR, reuiu laporan keuangan dan BMN TA 2025 sebanyak 27 laporan, reuiu laporan kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025, reuiu revisi DIPA dalam rangka penguatan pelaksanaan direktif prioritas Presiden TA 2026 pada UPT BSKJI, eselon II BSKJI, dan PUSDATIN, serta Reuiu Penajalan Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026 pada UPT BSKJI, Eselon II BSPKI, Pusdatin dan Inspektorat Jenderal. Selain itu, telah dilaksanakan pula reuiu RKBMN TA 2026 pada satker cakupan Inspektorat III dengan menghasilkan 27 laporan CHR. Secara keseluruhan, pelaksanaan penugasan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan melalui reuiu telah berjalan sesuai rencana dengan capaian output yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja dan keuangan pada unit kerja terkait.

Rekap Penugasan Dan Laporan Hasil Reuiu

No	Surat Tugas	Penugasan	Output
	30/IJ-IND/PW/2026	Melaksanakan Reuiu Revisi Anggaran TA 2026	6 Laporan CHR Revisi Anggaran (Eselon II) ITJEN
	43/IJ-IND/PW/2026	Melaksanakan Reuiu Revisi RKAKL TA 2026 pada Pusat Data dan Informasi	1 Laporan CHR PUSDATIN
		Melaksanakan Reuiu Revisi Anggaran TA 2026	30 Laporan CHR BSKJI

	40/IJ-IND.4/PW/2026	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan dan BMN TA 2025	27 Laporan CHR
	34/IJ-IND/PW/2026	Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025	1 Laporan CHR Laporan Kinerja ITJEN
	359/IJ-IND/PW/2025	Reviu Revisi DIPA Dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Direktif Prioritas Presiden TA 2026	31 CHR Revisi DIPA UPT BSKJI , Eselon II BSKJI dan PUSDATIN
	360/IJ-IND/PW/2025		
	9/IJ-IND/PW/2026	Melaksanakan Reviu RKBMN TA 2026 pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	27 Laporan CHR RKBMN
	91/IJ-IND/PW/2026	Melaksanaan Reviu Penajaman Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026 pada Cakupan Tugas Inspektorat III	3 Laporan CHR Revisi DIPA BSKJI, Pusdatin dan Inspektorat Jenderal
	69/IJ-IND/PW/2026	Reviu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2026 ke-5	1 Laporan CHR
	121/IJ-IND/PW/2026	Reviu Revisi Anggaran TA 2026 Pada Pusat Data dan Informasi	1 Laporan CHR
	124/IJ-IND/PW/2026	Reviu Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2026 pada BBSPJI Selulosa dan BSPJI Pontianak	2 Laporan CHR

2. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024

Sampai dengan Triwulan II, capaian indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan target sebesar 62% telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan data yang tersedia, rata-rata capaian penyelesaian tindak lanjut dari seluruh satuan kerja mencapai sekitar **78,75%**, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024

DATA REKAPITULASI T-1

N O.	SATUAN KERJA	HASIL PEMERIKSAAN			TINDAK LANJUT					
		TEMU AN (T)	REKOME NDASI (R)	NILAI	T	STATUS REKOMENDASI				NILAI
						SR	BSR	B	TP TD	
1	BSKJI	40	93	0	39	92	1	0	0	0
2	ITJEN	27	64	0	6	23	26	15	0	0
3	BBSPJI	90	194	0	90	194	0	0	0	0
4	BSPJI	118	262	9600 000	118	262	0	0	0	9600 000
5	PUSDATIN	23	39	0	17	33	6	0	0	0
	TOTAL	298	652	96000 00	270	604	33	15	0	9600 000

SALDO 2015 - 2024

N O.	SATUAN KERJA	HASIL PEMERIKSAAN			TINDAK LANJUT					
		TEMU AN (T)	REKOME NDASI (R)	NILAI	T	STATUS REKOMENDASI				NILAI
						SR	BSR	B	TP TD	
1	BSKJI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ITJEN	26	34	0	14	21	10	3	0	0
3	BBSPJI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BSPJI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PUSDATIN	2	3	0	2	3	0	0	0	0
	TOTAL	28	37	0	16	24	10	3	0	0

CATATAN: PRESENTASE = ((SR SALDO REKOMENDASI/TOTAL SALDO REKOMENDASI)+(SESUAI REKOMENDASI T-1/TOTAL REKOMENDASI T-1))/2

1. SALDO REKOMENDASI	2. DATA REKOMENDASI T-1
64,86%	92,64%
78,75%	

Inspektorat III memastikan bahwa satuan kerja terkait, menindaklanjuti secara efektif setiap rekomendasi hasil pengawasan

internal. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko, perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, dan penguatan pengendalian internal akan dilakukan. Indikator ini mencapai target realisasi 80%.

SK.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

1. Nilai SAKIP Inspektorat III

Sampai dengan periode pelaporan, capaian nilai SAKIP Inspektorat III sebesar 82,60 menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja telah berada pada kategori baik. Nilai tersebut mencerminkan bahwa seluruh komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi internal, telah dilaksanakan secara cukup efektif dan terintegrasi.

No	Satker	Nilai 2025	Kategori
3	Inspektorat II	82,60	A
4	Inspektorat III	82,60	A
2	Inspektorat I	82,00	A
5	Inspektorat IV	82,00	A
1	Sekretariat Itjen	80,80	A
6	Inspektorat Investigasi	78,85	BB

Dalam implementasinya, Inspektorat III telah mampu menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan strategis organisasi serta didukung oleh indikator kinerja yang cukup relevan. Pada tahap pelaksanaan, program dan kegiatan pengawasan internal telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dengan dukungan pengelolaan sumber daya yang memadai.

Selanjutnya, pada aspek pengukuran dan pelaporan kinerja, capaian kinerja telah disajikan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Proses evaluasi yang dilakukan secara berkala juga telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Selain melakukan penilaian terhadap kinerja internal, Inspektorat III juga melaksanakan evaluasi dan penilaian SAKIP pada unit kerja yang berada dalam lingkup pengawasannya, antara lain Unit Eselon II BSKJI serta unit Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan SAKIP pada masing-masing unit telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.

Dengan hasil sebagai berikut:

NO	Satker	Nilai 2026	Kategori
1	Sekretariat BSKJI	82,25	A
2	P2SI	81,1	A
3	PIH	80,95	A

4	P4SI	80,5	A
5	POPTIKJI	80,2	A
6	BSPJI Medan	82,6	A
7	BSPJI Banjarbaru	84,1	A
8	BSPJI Pontianak	84,1	A
9	BSPJI Manado	85,3	A
10	BSPJI Jakarta	84,7	A
11	BSPJI Padang	86,2	A
12	BSPJI Palembang	85	A
13	BSPJI Pekanbaru	85,6	A
14	BSPJI Samarinda	84,1	A
15	BSPJI Aceh	84,7	A
16	BSPJI Ambon	82,3	A
17	BSPJI Surabaya	86,2	A
18	BSPJI Bandar Lampung	84,1	A
19	BSPJI Padang	86,6	A
20	BSPJI Surabaya	86,75	A
21	BSPJI Pekanbaru	84,5	A
22	BSPJI Manado	82,7	A
23	BSPJI Palembang	85,4	A
24	BSPJI Jakarta	85,1	A
25	BSPJI Aceh	86	A
26	BSPJI Banjarbaru	86	A
27	BSPJI Pontianak	85,4	A
28	BSPJI Samarinda	85,4	A
29	BSPJI Bandar Lampung	80,3	A
30	BSPJI Medan	81,5	A
31	BSPJI Ambon	82,1	A
32	PUSDATIN	85,25	A

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2026, seluruh satuan kerja memperoleh kategori A dengan rentang nilai 80,2 hingga 86,75, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten. Nilai tertinggi dicapai oleh BSPJI Surabaya, sedangkan nilai terendah tetap berada pada kategori baik. PUSDATIN sendiri memperoleh nilai 85,25 yang mencerminkan kinerja yang sangat baik.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada unit Eselon II BSKJI dan PUSDATIN telah efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan pada kualitas indikator kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III

Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Inspektorat III sampai dengan periode pelaporan belum terealisasi atau belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena proses pengawasan kearsipan masih dalam tahap

pelaksanaan yaitu menunggu penilaian dari penilai, sehingga belum tersedia data hasil evaluasi yang dapat dijadikan dasar penilaian.

Saat ini pengukuran nilai kearsipan tahapan pengawasan telah selesai dilaksanakan, termasuk pengumpulan data, verifikasi. Saat ini dalam proses penyusunan laporan hasil pengawasan. Oleh karena itu, nilai tersebut baru dapat diketahui dan dilaporkan pada periode berikutnya setelah proses pengawasan kearsipan selesai secara keseluruhan.

SK.3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas

1. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III

Berdasarkan data tersebut, pada periode pelaporan Inspektorat III pada prinsipnya belum melakukan realisasi belanja pengadaan secara signifikan. Hal ini terlihat dari belum adanya komponen belanja yang menggunakan TKDN maupun impor, sehingga seluruh realisasi yang tercatat hanya berasal dari penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Inspektorat III masih terbatas atau belum berjalan secara optimal, masih berada pada tahap perencanaan atau proses awal pelaksanaan. Oleh karena itu, meskipun persentase penggunaan PDN tercatat tinggi, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan aktivitas pengadaan yang komprehensif karena realisasi belanja secara keseluruhan masih relatif terbatas.

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	10.088.499.000	7.536.727.512	898.448.600	769.000	83,61%
2.	Inspektorat I	301.978.000	294.620.000	0	0	97,56%
3.	Inspektorat II	1.032.590.000	795.651.181	0	0	77,05%
4.	Inspektorat III	284.974.000	276.344.762	0	0	96,97%
5.	Inspektorat IV	387.547.000	348.548.764	0	0	89,94%
6.	Inspektorat Investigasi	0	0	0	0	0,00%

B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

1. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja disampaikan dengan membandingkan antara rencana pelaksanaan kegiatan pada triwulan II (April-Juni) Tahun 2026 dengan realisasinya. Selain itu juga membandingkan antara capaian kinerja pada triwulan II dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026

Tabel 13 Analisis Capaian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat III (IKU)	0,45%	Belum dapat diukur
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit (Internal) Telah Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat III (IKU)	62%	78,75%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat III	79,45	82,60
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III	63	Belum dapat diukur
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III	91,3	Belum dapat diukur

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar kegiatan Inspektorat III masih dalam tahap persiapan/pelaksanaan/koordinasi. Sedangkan realisasi fisik sampai dengan Triwulan II TA 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Fisik Program/Kegiatan Inspektorat III Tahun 2026

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	TARG ET	TAR GET TW II	REALI SASI TW II	REALI SASI S.D. TW II	KEGIATAN/ OUTPUT
1	Audit	10 Lapora n	4 Lapora n	2 Laporan	7 Laporan	• LHA Audit Kinerja Eselon 1 BSKJI • LHA Audit Kinerja BBSPJIKMN Bandung • LHA Audit Kinerja BBSPJILM Bandung • LHA Audit Kinerja BBSPJIBBT Bandung • LHA Audit Kinerja BBSPJIT Bandung • LHA Audit Kinerja

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	TARG ET	TAR GET TW II	REALI SASI TW II	REALI SASI S.D. TW II	KEGIATAN/ OUTPUT
						BSBPJIKFK Jakarta • LHA Audit Kinerja BSPJI Jakarta
2	Reviu	84 Lapora n	0 Lapora n	7 Laporan	84 Laporan	• Reviu LK/BMN TA 2026 38 Satker: unit BSPJI Banda Aceh, BSBPJIKB Yogyakarta, BSPJI Padang, BSBPJIKFK Bandung, Pusdatin, BBSPJIS Bandung, BSPJI Manado, BSPJI Jakarta, BBPSPJIT Bandung, BSPJI Medan, BSPJI Bandar Lampung, BPSJI Pekanbaru, BSPJI Pontianak, BSPJI Palembang, BBSPJIA Bogor, BBSPJILMN Bandung, BBSPJPPI Semarang, BSPJI Surabaya, BSPJI Samarinda, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJIHPMN Makassar, BSKJI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Ambon, BBSPJIBBT Bandung, BBSPJIKKP Yogyakarta,

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	TARG ET	TAR GET TW II	REALI SASI TW II	REALI SASI S.D. TW II	KEGIATAN/ OUTPUT
						Inspektorat Jenderal, Pusdatin. Unit Eselon 2 PIH, P4SI, P2SI, Ses Bskji, Poptikji. • Reviu Revisi RKAKL TA 2026 pada BSKJI dan Inspektorat Jenderal • Reviu DIPA Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2026 ke-5 • Reviu Revisi Anggaran TA 2026 pada PUSDATIN • Reviu Penajaman Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026 pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III • Reviu Perubahan RKBMN TA 2026 pada BBSPJI Selulosa dan BSPJI Pontianak
3	Monitoring dan Evaluasi	27 Lapora n	27 Lapora n	0 Laporan	27 Laporan	• Evaluasi Sakip • 24 Upt Bskji • Unit Eselon 2 Bskji • Unit Eselon 2 Inspektorat Jenderal • Pusdatin

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	TARG ET	TAR GET TW II	REALI SASI TW II	REALI SASI S.D. TW II	KEGIATAN/ OUTPUT
4	Consulting dan Pengawasan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
5	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
6	Layanan Manajemen Kinerja	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
7	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	RAB Inspektorat III
6.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan Lakip 2026

Capaian pelaksanaan kegiatan audit pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 4 kegiatan audit, realisasi yang dapat dilaksanakan hanya sebanyak 2 kegiatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan penajaman anggaran yang mengharuskan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan. Akibatnya, sebagian kegiatan audit yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan pada periode pelaporan ini, sehingga tingkat capaian kinerja kegiatan audit pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 mencapai 50% dari target yang ditetapkan.

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 tidak memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 27 kegiatan. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian besar kegiatan evaluasi SAKIP telah dilaksanakan lebih awal pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah direalisasikan sebanyak 37 kegiatan evaluasi SAKIP, sehingga pada Triwulan II jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi lebih sedikit dari target yang telah direncanakan. Meskipun target Triwulan II tidak tercapai, secara kumulatif pelaksanaan kegiatan evaluasi SAKIP telah menunjukkan capaian yang baik karena realisasi pada Triwulan I telah melampaui target yang ditetapkan.

2. Analisa Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II TA 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Anggaran yang dicapai sampai Triwulan II Tahun
Anggaran 2026

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	706.976.000	407.145.000	392.816.418	96,48%
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	706.976.000	407.145.000	392.816.418	96,48%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
955	Layanan Manajemen Keuangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
965	Layanan Audit Internal	378.254.000	187.542.000	185.706.659	99,02%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	378.254.000	187.542.000	185.706.659	99,02%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
975	Layanan Manajemen Kinerja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
981	Layanan Rivi	2.077.000	4.124.000	2.243.000	54,39%
982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	172.393.000	134.356.000	131.685.420	98,01%
983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	150.252.000	77.123.000	69.181.339	89,70%
BLOKIR AA		-			
BLOKIR PENGHEMATAN		-			

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan II tahun 2026, kendala yang dirasa Inspektorat III antara lain:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
 - a. Pertama, penajaman anggaran yang menyebabkan keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan audit harus dilakukan secara lebih selektif dan efisien.
 - b. Kedua, efektivitas pelaksanaan audit dipengaruhi oleh keterbatasan waktu akibat tumpang tindih dengan penugasan lain, seperti reviu revisi anggaran, yang menyita sebagian alokasi waktu auditor.
 - c. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia auditor masih menjadi tantangan karena terdapat lima PNS yang baru dilantik dan belum

memiliki kualifikasi auditor melalui diklat auditor, sehingga belum dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas audit.

2. Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit (Internal) Telah Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat III (IKU)

- a. Pertama, belum seluruh satuan kerja menunjukkan kinerja yang optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, yang berdampak pada belum meratanya capaian di setiap unit kerja.
- b. Kedua, belum optimalnya ketepatan waktu penyampaian data dan dokumen pendukung tindak lanjut oleh satuan kerja menyebabkan proses verifikasi serta penilaian tindak lanjut rekomendasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- c. Ketiga, koordinasi antara unit pengawas dan satuan kerja yang diawasi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam proses klarifikasi dan konfirmasi status tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
- d. Keempat, terbatasnya sumber daya manusia pada satuan kerja mengakibatkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi belum memperoleh prioritas yang memadai.
- e. Kelima, masih terdapat temuan hasil pengawasan yang memerlukan upaya penyelesaian lebih lanjut karena tingkat kompleksitasnya cukup tinggi, terutama temuan lama yang melibatkan koordinasi lintas unit, perubahan kebijakan, atau keterbatasan dokumen pendukung.

3. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III

- a. Belum tersedianya pejabat fungsional arsiparis di lingkungan Inspektorat III, sehingga pengelolaan kearsipan masih dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki tugas utama pada bidang lain. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, pengelompokan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip, belum dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan yang berlaku.
- b. Penataan arsip fisik dan arsip digital masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek klasifikasi, penamaan dokumen, pengindeksan, serta penempatan arsip berdasarkan sistem yang baku. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penelusuran dan penemuan kembali arsip membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama terhadap dokumen hasil pengawasan yang telah diterbitkan pada periode sebelumnya.
- c. Meningkatnya volume arsip yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan setiap tahun memerlukan kapasitas pengelolaan yang lebih besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Bertambahnya jumlah laporan hasil audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan dokumen pengawasan lainnya menuntut pengelolaan arsip yang lebih sistematis agar arsip tetap tertata, mudah diakses, dan terjaga keamanannya.
- d. Masih terdapat arsip hasil pengawasan periode sebelumnya yang memerlukan penataan dan penyesuaian kembali, baik dari sisi

klasifikasi, kelengkapan dokumen, maupun kesesuaian dengan ketentuan kearsipan terbaru, sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan dalam proses penataannya.

F. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan II ini, Inspektorat III mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
 - a. Menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan audit dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga kegiatan pengawasan dapat diarahkan pada area yang memiliki potensi dampak terbesar terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 - b. Melakukan perencanaan dan pengaturan jadwal penugasan secara lebih terintegrasi, guna meminimalkan terjadinya tumpang tindih kegiatan serta menghindari penumpukan penugasan dalam periode yang sama.
 - c. Melakukan pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas dalam tim audit serta mengoptimalkan keterlibatan PNS yang baru dilantik untuk mendukung pelaksanaan tugas administratif dan pengumpulan data awal.
2. Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III
 - a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan arsiparis pada unit kerja lain untuk memperoleh pendampingan dan berbagi pengetahuan terkait tata kelola kearsipan. Di samping itu, kondisi belum tersedianya pejabat fungsional arsiparis di lingkungan Inspektorat III telah dikomunikasikan kepada Sekretariat guna menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan sehingga pengelolaan arsip dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
 - b. Melaksanakan penataan arsip secara bertahap sesuai klasifikasi arsip yang berlaku, melakukan penyeragaman penamaan dan pengelompokan dokumen, serta menyusun daftar arsip guna memudahkan proses penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Selain itu, dilakukan pemutakhiran arsip digital secara berkala agar tersusun secara lebih sistematis dan terstruktur.
 - c. Melakukan inventarisasi dan pengelompokan arsip secara berkala, menyusun prioritas penataan terhadap arsip yang memiliki nilai guna tinggi, serta mengoptimalkan pengelolaan arsip digital untuk mendukung efisiensi penyimpanan dan akses dokumen. Di samping itu, akan dilakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan sarana dan mekanisme pengelolaan arsip seiring dengan peningkatan jumlah arsip yang dihasilkan.
 - d. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap arsip yang belum tertata, melaksanakan penataan ulang sesuai klasifikasi dan ketentuan kearsipan yang berlaku, serta melengkapi dokumen yang masih memerlukan penyesuaian. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas pada arsip yang sering digunakan dan memiliki nilai guna tinggi bagi pelaksanaan tugas pengawasan.
3. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2024

- a. Mengoptimalkan kegiatan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pada setiap satuan kerja untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi.
 - b. Memberikan batas waktu yang jelas terkait penyampaian dokumen pendukung tindak lanjut serta menyampaikannya melalui mekanisme resmi kepada satuan kerja terkait.
 - c. Melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan melalui rapat singkat dan komunikasi daring berkala guna mempercepat penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan.
 - d. Mendorong setiap satuan kerja untuk menetapkan penanggung jawab (PIC) yang secara khusus mengoordinasikan dan memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
 - e. Melakukan pemetaan temuan berdasarkan tingkat kemudahan penyelesaiannya dan memberikan perhatian khusus terhadap temuan yang kompleks melalui forum pembahasan atau penyampaian kepada pimpinan untuk memperoleh solusi yang tepat.
4. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal Tahun 2015-2023
- a. Mendorong penyelesaian proses penandatanganan dokumen Renstra Eselon I secara tepat waktu melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan dan pihak terkait.
 - b. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja guna meningkatkan kualitas penyusunan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi.
 - c. Menyusun format dan pedoman standar data dukung guna memudahkan satuan kerja dalam menyampaikan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyusun rencana dan jadwal evaluasi sejak awal tahun serta melakukan pembagian tim pelaksana secara proporsional untuk meminimalkan penumpukan pekerjaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan evaluasi.

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada periode triwulan II tahun 2026 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada Triwulan II TA 2026 adalah sebesar 166 (Seratus Enam Puluh Delapan) :

Tabel 16 Output kegiatan yang direalisasikan pada Triwulan I TA 2026

N O	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW II	REALISASI I TW II	REALISASI S.D TW II
1	Audit	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	7 Laporan
2	Reviu	84 Laporan	Laporan	7 Laporan	130 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	27 Laporan	27 Laporan	0 Laporan	27 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan

keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2026 (Januari – Juni) mencapai Rp. 392.816.418 sebesar 96,48% dari pagu Rp407.145.000,-.

Tabel 17 Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II TA 2026

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	706.976.000	407.145.000	392.816.418
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	706.976.000	407.145.000	388.617.418
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000

955	Layanan Manajemen Keuangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
965	Layanan Audit Internal	378.254.000	187.542.000	185.706.659
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	378.254.000	187.542.000	185.706.659
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
975	Layanan Manajemen Kinerja	1.000.000	1.000.000	1.000.000
981	Layanan Rivi	2.077.000	4.124.000	2.243.000
982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	172.393.000	134.356.000	131.685.420
983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	150.252.000	77.123.000	69.181.339
BLOKIR AA	-			

Pada Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan audit di Inspektorat III masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan pengawasan. Penajaman anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan mengakibatkan keterbatasan alokasi anggaran, sehingga pelaksanaan audit perlu difokuskan pada kegiatan yang menjadi prioritas. Selain itu, pelaksanaan audit juga dihadapkan pada keterbatasan waktu karena auditor harus menangani beberapa penugasan secara bersamaan, termasuk kegiatan reviu revisi anggaran, yang menyebabkan waktu pelaksanaan audit menjadi terbatas. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia auditor, mengingat terdapat lima PNS yang baru dilantik dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan auditor, sehingga belum dapat diberdayakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Permasalahan lainnya terkait nilai Hasil Pengawasan Kearsipan antara lain pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Inspektorat III masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi penyelenggaraan kearsipan. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya pejabat fungsional arsiparis, sehingga pengelolaan arsip masih dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki tugas utama pada bidang lain. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengelolaan arsip belum dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan standar dan ketentuan kearsipan yang berlaku. Selain itu, penataan arsip fisik dan arsip digital masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek klasifikasi, pengindeksan, penamaan dokumen, dan penyimpanan arsip secara sistematis, sehingga proses

penelusuran dan penemuan kembali dokumen masih membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Di samping itu, peningkatan volume arsip yang dihasilkan dari berbagai kegiatan pengawasan setiap tahun menuntut kapasitas pengelolaan yang lebih memadai, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Kendala lainnya adalah masih terdapat arsip hasil pengawasan periode sebelumnya yang memerlukan penataan dan penyesuaian kembali sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku, sehingga membutuhkan tambahan waktu dan sumber daya dalam proses penyelesaiannya. Demikian Laporan Inspektorat III periode Triwulan II Tahun 2026, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 Rencana Aksi Inspektorat III Tahun Anggaran 2026

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2026
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III

No	Bidang	Indikator Kerja	Target Total	Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Penanggung Jawab	Pencapaian		
				Rencana Kegiatan	Target Akhir	Rencana Kegiatan	Target Akhir	Rencana Kegiatan	Target Akhir	Rencana Kegiatan	Target Akhir				
1	Meningkatnya kualitas pengkajian	Batas Tolak dan Tindakan Material Pengawasan Eksternal (BU)	0,4%	Audit Kinerja dan Kepuasan F. evi. FKA-XL Audit Kinerja Anggrem F. evi. Laporan Keuangan Audit Kinerja F. evi. F. KEMH Evaluasi SAKIP (UPT DGLJ, Eselon II Revisi Laporan Evaluasi Program Kegiatan Pokok Akumul. Manajemen Risiko Pengendalian Kegiatan RI	Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT	Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT	Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT	Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT Audit Kinerja DSKJ PUSAT	0,4%	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III				
		Revisi laporan hasil pengawasan (audit) internal dan eksternal (BU)	0,2%									0,2%	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Hasil SAKIP Inspektorat III	79,43	Monitoring dan Evaluasi Kinerja unit secara berkala Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Penilaian Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024 Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024 Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024 Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024 Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024 Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024 Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024 Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024 Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 dan RPJN TA 2024	79,43									INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III
		Hasil Hasil Pengawasan Kelembagaan Inspektorat III	63	Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional) Pengawasan Anup (Elektronik dan konvensional)								63	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III	
3	Tata Kelola Anggaran Inspektorat dan Badan Yang Terkait	Penerapan Penggunaan Produk Dalam Rangka dan Pengawasan Budget dan dana jasa pemerintah	91,3%	Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026 Penerapan proses pengadaan TA 2026								91,3%	INSPEKTUR III	Seluruh Pegawai Inspektorat III	

Jakarta, 1 April 2025
Inspektorat III

M. HIZAM

Lampiran 2 Rekapitulasi Tindak Lanjut Satuan Kerja Binaan Inspektorat III

DATA REKAPITULASI T-1

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	BSKJI	40	93	0	39	92	1	0	0	0
2	ITJEN	27	64	0	6	23	26	15	0	0
3	BBSPJI	90	194	0	90	194	0	0	0	0
4	BSPJI	118	262	9600000	118	262	0	0	0	9600000
5	PUSDATIN	23	39	0	17	33	6	0	0	0
	TOTAL	298	652	9600000	270	604	33	15	0	9600000

Saldo 2015 - 2024

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	BSKJI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ITJEN	26	34	0	14	21	10	3	0	0

Lampiran 3 Hasil Evaluasi SAKIP TA 2025 untuk Eselon II Inspektorat Jenderal

Hasil Evaluasi SAKIP TA 2025 untuk Eselon II INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)

No	Satker	Nilai 2024	Kategori	Nilai 2025	Kategori	Kesimpulan	Kenaikan Nilai
1	Sekretariat Itjen	80.75	A	80.80	A	NAIK	0.05
2	Inspektorat I	80.9	A	82.00	A	NAIK	1.10
4	Inspektorat II	81.8	A	82.60	A	NAIK	0.80
3	Inspektorat III	80.30	A	82.60	A	NAIK	2.30
5	Inspektorat IV	81.5	A	82.00	A	NAIK	0.50
6	Inspektorat Investigasi	-	-	79,60	BB	BARU	-

Nilai tertinggi = 82,60 (Inspektorat II & Inspektorat III)

Nilai terendah = 79,60 (Inspektorat Investigasi)

Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan informasi bahwa :

1. Jika dibandingkan dengan capaian SAKIP TA 2024, pada evaluasi SAKIP TA 2025 nilai pada seluruh unit **Eselon II ITJEN meningkat dan masih memperoleh predikat A**, kecuali 1 unit yang baru ditetapkan pada tahun 2025 (**Inspektorat Investigasi**) **mendapat predikat BB**.
2. Beberapa hal yang menyebabkan disparitas nilai antar unit Eselon II ITJEN antara lain :

Aspek	Sub Komponen	Catatan
1	Perencanaan	
1a	Ketersediaan dokumen SOP perencanaan kinerja	- Sekretariat dan Inspektorat I-IV sudah menetapkan SOP Penyusunan Renstra, Perkin, dan Renkin di masing-masing tingkat eselon II. (Nilai bisa A) - Inspektorat Investigasi belum menetapkan SOP perencanaan kinerja sendiri. (Nilai maksimal BB)
1c	Perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk hasil berkesinambungan melalui pemantauan berkala	- Terdapat beberapa unit yang sudah melaksanakan pemantauan rencana aksi bulanan yakni : Inspektorat I, II, III dan IV dalam bentuk pelaporan, nota dinas, maupun rapat internal. (Nilai bisa A) - Sekretariat Itjen melaksanakan pemantauan bulanan, namun masih terbatas untuk capaian output anggaran dan kegiatan, belum mencakup pemantauan capaian rencana aksi kinerja. Sedangkan Inspektorat Investigasi baru melaksanakan pemantauan berkala periode triwulanan. (Nilai maksimal BB)

2	Pengukuran	
2a	Pedoman teknis pengumpulan data kinerja	- Untuk pedoman pengukuran kinerja sudah dijelaskan dalam masing-masing renstra, namun untuk pengumpulan data kinerja, beberapa unit menetapkan SOP sendiri diantaranya : Sekretariat Itjen, Inspektorat II, Inspektorat III. (Nilai bisa A) - Inspektorat I, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi tidak menetapkan SOP terkait pengumpulan data kinerja. (Nilai maksimal BB)
3	Pelaporan Kinerja	
3a	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu	- Terdapat beberapa unit yang telah menjalankan reviu terhadap dokumen LAKIP nya dan telah berjalan lebih dari 1 tahun yakni pada : Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV (Nilai bisa A) - Sekretariat Itjen dan Inspektorat Investigasi baru melaksanakan reviu terhadap dokumen LAKIP nya untuk dokumen periode 2025. (Nilai maksimal BB)
4	Evaluasi AKIP	
	Tidak ada perbedaan nilai di setiap IR dan Sekretariat	

3. Kondisi yang secara umum dinilai sama pada setiap unit Eselon II ITJEN :

Aspek	Sub Komponen	Catatan
1	Perencanaan	
1b	Dokumen perencanaan Kinerja diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu	- Untuk periode renstra 2025-2029, format dokumen renstra Eselon II harus ditetapkan di tingkat unit eselon I. - Pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP, dokumen renstra ITJEN yang meliputi renstra Eselon I ITJEN, renstra Sekretariat ITJEN, serta renstra Inspektorat I-IV dan Investigasi masih dalam proses reviu oleh Biro Perencanaan, sehingga dokumen yang dinilai masih berupa draft yang belum ditetapkan/diformalkan. - Dokumen renstra yang belum ditetapkan otomatis tidak dapat dipublikasikan tepat waktu.
	Analisis penetapan indikator kinerja, IKU dan target	- Untuk indikator kinerja Eselon II ITJEN, terdapat beberapa indikator Program Dukungan Manajemen dan target yang disesuaikan dengan edaran Biro Perencanaan (mandatory turunan indikator Kementerian dan Eselon I), namun belum ada dokumentasi atas analisis

		penetapan indikator kinerja di lingkungan ITJEN. - Secara umum indikator kinerja khususnya di Inspektorat I-IV tidak menggambarkan capaian atas kegiatan utama pengawasan di tiap Inspektorat (audit, reviu, monev). - Juga belum terdapat basis data maupun data historis dalam proses penetapan target seluruh indikator ITJEN. (Nilai seluruh unit Maksimal B)
2	Pengukuran	
2b	Pengukuran capaian kinerja di ITJEN belum memanfaatkan teknologi informasi	- Pada periode 2025, pengukuran capaian kinerja yang sebelumnya dilakukan melalui ALKI dan monev Perkin di Intranet Kemenperin tidak dapat dijalankan dikarenakan kendala dan penyesuaian teknis. Namun tiap Eselon II ITJEN tidak menyediakan backup sistem/teknologi lainnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja (misalnya : spreadsheet excel) - Pengukuran yang memanfaatkan sistem yg masih berjalan hanya emonev Bappenas, namun yang dipantau hanya sebatas capaian output. (Nilai seluruh unit maksimal BB)
2c	Pengukuran Capaian Kinerja dijadikan dasar untuk pemberian rewards & punishment	- ITJEN telah menetapkan SK Pemberian Reward dan Punishment, namun implementasinya selama tahun 2025 tidak dilakukan. - Meskipun terdapat pemberian punishment kepada beberapa pegawai terkait kedisiplinan di tahun 2025, namun tidak terdapat evaluasi capaian kinerja pegawai yang mengarah pada pemberian reward di tahun 2025 (terakhir di tahun 2024). (Nilai seluruh unit maksimal BB)
3	Pelaporan Kinerja	
3b	Dokumen Laporan Kinerja Telah memenuhi standar kualitas	- Seluruh informasi dalam LAKIP dinilai berkualitas sesuai dengan sub komponen penilaian - Walaupun pada Inspektorat Investigasi sebagai unit baru terdapat beberapa hal yang belum dapat dianalisis, namun untuk perbandingan yang dijelaskan dalam LAKIP sudah memadai. (Nilai seluruh unit maksimal BB)
3c	Pelaporan Kinerja Memberikan dampak	- Pelaporan kinerja secara umum memberikan dampak atas penyesuaian aktivitas dan anggaran yang dilaksanakan secara

		menyeluruh di lingkungan ITJEN (revisi anggaran). - Belum ada informasi tambahan khususnya untuk perubahan budaya kinerja di lingkungan ITJEN. (Nilai seluruh unit maksimal BB)
4	Evaluasi AKIP	
4a	Terkait pedoman evaluasi AKIP yang berlaku telah ditetapkan lebih dari 2 tahun (Kepmenperin Nomor 2181 Tahun 2024)	(Nilai seluruh unit A)
4b	Terkait pelaksanaan evaluasi AKIP oleh APIP sudah memanfaatkan teknologi informasi (fitur SAKIP2 di intranet) walaupun masih bertahap baru sampai evaluasi di tingkat Eselon I.	(Nilai seluruh unit BB)
4c	Implementasi SAKIP telah meningkat	- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti di masing-masing unit Eselon II ITJEN, kecuali Inspektorat Investigasi yang baru dievaluasi pada periode 2025, namun nilai diseragamkan. (Nilai seluruh unit Maksimal BB)

Berdasarkan hasil evaluasi di atas akan segera disusun Berita Acara Hasil Evaluasi serta disusun Laporan Hasil Evaluasi yang memuat catatan dan rekomendasi untuk implementasi SAKIP di setiap unit eselon II ITJEN.